

# Genealogi Ratu Nusantara: Sejarah, Mitos & Politik Negara Modern

**Ryan Sugiarto**

Program Magister Sains Psikologi, Universitas Gajah Mada

[ryansiip@yahoo.com](mailto:ryansiip@yahoo.com)

---

## Abstract

Genealogy and history of queens in Nusantara had been written in golden ink. Their histories across Nusantara were not only an accumulation of wives or ruler, but also inhibited the magic-realism of modern Indonesian society. However, the minimum or rare documents of Nusantara's women leadership had blurred their real representation and strong leadership. This paper investigates the history, roles, status and profiles of women's leader. This paper aims to support current political situation specifically on the tradition of writing woman's her-stories. From this perspective legitimacy of power from history are taken to support women's leadership in current modern Indonesia state.

Keywords: queen, Nusantara, myth, state.

---

## Abstrak

Sejarah panjang kekuasaan dan kepemimpinan perempuan nusantara mencatat hasil yang gemilang. Sejarah perempuan penguasa tidak hanya menempatkan dirinya sebagai ratu atau penguasa kerajaan, tetapi juga memenuhi ruang kesadaran magis masyarakat melalui mitos. Namun minimnya literasi mengenai peran dan sejarah kuasa perempuan yang ditulis oleh sejarawan, membuat bangsa ini seolah tidak pernah dipimpin oleh perempuan. Tulisan ini bermaksud mengkaji kuasa perempuan nusantara dan sejarah kekuasaan perempuan Indonesia yang berlangsung berabad silam dan mitos yang hidup hingga saat ini. Tulisan ini diharapkan mampu memberi ruang untuk mengetengahkan pengalaman perempuan nusantara memimpin negeri. Sekaligus mendorong kemungkinan penulisan sejarah yang berpihak pada perempuan. Sehingga sebagai sebuah bangsa, memiliki kajian yang berpijak pada khasanah perempuan nusantara untuk memberi dasar pada kekuatan politik perempuan hari ini.

Kata kunci: ratu, Nusantara, mitos, negara.

---

## Pendahuluan

Siapa bilang perempuan tidak mampu berkuasa dan memimpin negara? Pertanyaan ini seharusnya menjadi pertanyaan besar sekaligus tantangan yang dijawab dengan mudah. Perempuan dari masa ke masa selalu mampu menempati ruang yang biasanya diasosiasikan kepada laki-laki: pemimpin. Sejarah selalu membuktikan bahwa kuasa kepemimpinan perempuan sudah ada sejak berabad-abad silam. Dalam bentangan luas nusantara, kepemimpinan perempuan selalu dapat dijumpai. Kuasa perempuan dalam ranah politik kebangsaan selalu ada. Kuasa perempuan dalam politik bahkan tidak hanya pada tataran realitas (sejarah), namun juga diceriterakan dalam banyak kisah, mitos dan sastra klasik. Sayangnya, posisi kepemimpinan perempuan jarang, untuk tidak mengatakan tidak pernah, mendapatkan kajian yang mendalam oleh para pengkaji politik maupun sejarawan.

Menelisis gaya dan sejarah kepemimpinan perempuan masih merupakan kajian yang langka. Hasinya, kita seolah tidak memiliki referensi bagaimana gaya dan cara perempuan menduduki kuasa politik tertinggi di negeri ini, baik era nusantara, maupun jaman modern sekarang. Padahal, variatifnya peran perempuan dalam aspek gerakan politik, kekuasaan politik, dan kuasa makna memberi kita bukti bahwa ruang-ruang kuasa tidak hanya milik laki-laki. Tetapi, perempuan dalam sejarah peradaban selalu memegang peran penting. Namun, contoh penting itu tertutup oleh hasrat kuasa yang meminggirkan perempuan dalam kuasa politik. Sehingga, hanya sedikit dari perempuan yang “diperkenankan” untuk menduduki wilayah-wilayah penting dalam politik hari ini. “Pengkondisian” ini seolah menutup mata bahwa dalam sejarahnya perempuan mampu dan memiliki peran penting dalam politik kebangsaan, politik kekuasaan. Bahwa pada era 80-an kajian perempuan *booming*, namun tidak disertai dengan kualitas kajian (Fakih, 1996). Kualitas dan kuantitas kajian mengenai perempuan, baik tentang subjek perubahan sosial, peran perempuan, masih parsial dan cenderung mengulang-ulang.

Di sisi yang lain, kurangnya kajian tentang perempuan secara komprehensif tidak mengurangi sedikit pun keutamaan perempuan. Bahkan sebagaimana disampaikan oleh sejarawan Kuntowijoyo, dengan jelas, menyatakan bahwa perempuan mempunyai keutamaan dalam banyak hal. Ia nyatakan bahwa “ternyata perempuan lebih kuat

dari laki-laki!" Walaupun demikian, sejarah perempuan masih kabur dalam sebuah penulisan sejarah. Kuntowijoyo menyebutkan topik-topik seperti, "perempuan dalam dunia usaha", "perempuan dalam kesenian", "perempuan dalam politik", "perempuan dalam perang gerilya", "perempuan dalam dunia pendidikan", dan sebagainya, dapat ditulis oleh ilmuwan sejarah. Penulisan mengenai peranan perempuan dalam berbagai sektor tersebut dapat memperjelas peranan perempuan dalam bidang sosial-ekonomi yang selama ini belum banyak dilakukan oleh sejarawan. Bahkan dalam sektor tertentu, perempuan menjadi tulang punggung sebuah sektor (Sadi, H & Bungkidapu, Y, 2013; Kuntowijoyo, 2008). Pertanyaannya, bagaimana sejarah kuasa perempuan dan kajian kepemimpinan politik perempuan nusantara? Mengapa era gemilang itu tidak dialami, diangkat, dan dikaji secara lebih serius? Apa latar yang mengkondisikan bahwa perempuan tidak tepat menjadi pemimpin? Tulisan ini bermaksud untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas. Sembari mengkaji lebih dalam mengenai sejarah, mitos, dan kedudukan perempuan dalam khasanah nusantara. Tujuan penulisan ini tiada lain untuk memberikan ruang kajian yang lebih dalam, tentang kepemimpinan politik perempuan. Pun, juga diharapkan mampu memberikan perspektif lain dalam cara dan gaya kepemimpinan nusantara, Indonesia. Lebih jauh, naskah ini juga diharapkan memberikan satu kepingan untuk menyusun kajian perempuan dengan lebih komprehensif. Setiap gerakan perempuan, dan upaya perempuan untuk "merebut" kuasa politik, sudah semestinya juga diikuti dengan kajian akademis.

### **Jejak Kepemimpinan Ratu-Ratu di Nusantara**

Sejarah nusantara adalah sejarah panjang perempuan. Dalam banyak literasi klasik kekuasaan dan mitos perempuan menempati sebagian besar narasi nusantara. Dalam rentang luas nusantara pula perempuan-perempuan mempunyai kuasa yang tidak kalah besar dalam arus perubahan. Baik diceriterakan dalam sejarah lisan dan tulisan, maupun diungkapkan dalam berbagai mitologi. Menariknya, dari serangkaian sejarah panjang perempuan pemimpin nusantara, yang berada di banyak negeri, menumbuhkan cerita mengesankan. Perempuan nusantara adalah perempuan tangguh yang mampu dan mempunyai kapasitas kepemimpinan. Kepemimpinan mereka dalam banyak

peristiwa, adalah kepemimpinan yang tangguh, menyejahterakan, dan diagungkan oleh rakyatnya. Peristiwa-peristiwa ini menjadi sejarah tersendiri bagi perempuan nusantara khususnya sebagai pelajaran yang relevan untuk hari ini dan masa depan. Di Jawa peran dan kuasa perempuan digambarkan dalam banyak hal.

*Pertama*, penyebutan ratu, misalnya dalam *ratu adil*, sebagai sebuah sosok yang diidam-idamkan memberikan era kepemimpinan yang diinginkan rakyatnya, menyejahterakan, dan disegani. Semiotika “Ratu” dalam *ratu adil* merupakan penanda bahwa pemimpin yang diidamkan itu adalah sosok perempuan. Barangkali ada perdebatan menafsirkan ini, tetapi istilah raja dan ratu tentu memiliki pengertian yang berbeda, meskipun dalam beberapa penggunaan disebutkan sama, yaitu penguasa kerajaan. Tetapi yang perlu ditelaah ulang, dari sisi linguistik maupun semiotik, kedua kata (raja dan ratu) bagaimana posisi penggunaannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, raja didefinisikan sebagai penguasa tertinggi pada suatu kerajaan, atau bisa juga orang yang mengepalai atau memerintah suatu bangsa atau negara. Dalam banyak kenyataan ditemukan raja adalah laki-laki, sedangkan ratu adalah pemimpin kerajaan yang dipegang oleh perempuan, atau istri dari sang raja. Namun dalam sejarah kerajaan-kerajaan pemimpin yang memerintah kerajaan juga dikenal dengan istilah ratu, karena ia seorang perempuan. Jika dalam kosakata hari ini raja diidentikkan dengan laki-laki dan ratu dengan perempuan, maka mitos *ratu adil* sesungguhnya menempatkan perempuan sebagai tokoh politik yang diidamkan yang mampu mengentaskan negara dari beragam persoalan pelik.

Dua istilah itu tentu memuat arti yang bisa dibedakan. Maka penantian “*ratu adil*” sebagaimana yang sering keluar dalam setiap prosesi pergantian kepemimpinan negeri ini (baca, Pemilu) bisa dimaknai bahwa negeri ini mendambakan sosok perempuan yang mampu memimpin Indonesia, dan menyejahterakannya. *Ratu Adil* dimaknai sebagai sebuah sebutan untuk tokoh kharismatik “*pesuruh Tuhan*” yang memimpin gerakan-gerakan dalam menentang berbagai perubahan sosial sebagai akibat penetrasi pemerintahan kolonial yang semakin kuat. Orang percaya bahwa *Ratu Adil* akan datang atas nama Tuhan untuk menghukum orang-orang Jahat (B. Setiawan, 1990). Masyarakat Jawa sering kali mengaitkan mitos *Ratu Adil* ini dengan Ramalan Prabu Jayabaya, yang berkuasa pada 1135-1157 M. Pada masa

pemerintahannya Kediri mencapai puncak kejayaannya. Jayabaya mewariskan beberapa karya sastra Jawa Kuno, yang kemudian dilanjutkan oleh pujangga-pujangga masa Surakarta seperti Yasadipura I, Yasadipura II, dan Ranggawarsita. Dalam karya-karya sastra itu banyak menyebutkan bahwa penderitaan yang mereka alami, seperti peningkatan beban pajak, harga hasil bumi merosot tajam, hukum dan pengadilan tidak berjalan semestinya, syariat Tuhan tidak lagi dijalankan, banyak orang akan tersingkir dan orang jahat akan berkuasa, pemerintahan tidak berjalan dengan baik dan rakyat semakin sengsara, banyak terjadi bencana alam, dan krisis-krisis sosial lainnya, akan hilang dengan datangnya Ratu Adil. Hal ini termuat dalam *Kitab Muassar* karya Prabu Jayabaya. Dengan demikian, Ratu Adil, dalam tradisi Jawa lebih bersifat politis, meskipun ada sedikit sebagai gerakan mistis (kebatinan). Mitos Ratu Adil ini terwujud dalam bentuk tampilnya seorang pemimpin, yang dianggap dapat menjadi tokoh yang menyelesaikan permasalahan atau krisis yang melanda. Zaman edan tidak mungkin diubah dengan cara lain kecuali menanti tokoh Ratu Adil tersebut.

*Kedua*, mitologi Ratu Laut Selatan yang begitu fenomenal di Jawa juga memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya kuasa perempuan begitu diterima dalam hampir seluruh alam sadar dan ketidaksadaran warga. Ratu laut selatan atau dikenal Ratu Kidul dalam mitologi ini menguasai laut selatan yang luasnya bahkan melebihi daratan. Ratu Kidul adalah partner raja-raja Mataram dalam menjaga keseimbangan kosmologi Jawa. Dua mitologi di atas memberikan kita satu pandangan bahwa perempuan, dari sebutan ratu, memiliki kuasa yang terserap dalam alam kesadaran dan ketidaksadaran masyarakat Indonesia. Mitos dapat dijadikan sebagai fakta mental dan dapat diterima meskipun secara substansi kebenarannya masih harus diperdebatkan. Mitologi itu tumbuh berdasarkan kepercayaan, maka bagi bangsa-bangsa kuno yang berpandangan hidup seperti itu, mitos-mitos juga merupakan realitas yang tidak berbeda dengan sejarah (Sartono Kartodirdjo, 1993). Di berbagai bangsa Asia (termasuk Jawa, Indonesia) mitos menjadi bagian penting di dalam sikap-sikap sosio-religius masyarakatnya, dan jauh dari pengertian fiktif. Adapun di Eropa (Barat), mitos bersumber dari kebudayaan Yunani Kuna yang menganggap mitos sebagai fiksi belaka yang lebih banyak diekspresikan lewat sajak-sajak maupun pementasan-pementasan teater (Bonney, 1993).

Selanjutnya, mari kita beranjak menelusuri sejarah, realitas tentang beberapa kemasyhuran perempuan pemimpin nusantara di negerinya masing-masing. Melalui sejarah panjang perjalanan nusantara, kita memiliki pengalaman dipimpin oleh perempuan-perempuan hebat. Diantara mereka adalah Ratu Sinuhun yang memerintah Palembang dari tahun 1616-1628, Dayang Lela (1790) menggantikan suaminya, Jaya Kusuma, memerintah Kerajaan Mempawa di Kalimantan Barat. Di Sulawesi Selatan pada abad 19 dikenal raja-raja perempuan yaitu Daeng Pasuli dari daerah Sawito, Pada dari daerah Alita, Adi Matanang dari Rapang, Siti Aisyah dari Barru, dan I Madina Daeng Bau dari daerah Lakiang (Hayati, 2010; Sadi, h & Bungkundapu, Y, 2013). Daftar itu masih diperpanjang dengan adanya We Tanri Ole yang pernah memerintah Ternate. Bahkan Kerajaan Aceh yang kini menggunakan syariat Islam, pernah memiliki tokoh perempuan yang paling banyak dalam bidang pemerintahan, politik, dan militer. Tokoh-tokoh itu adalah Ratu Nur Ilah (wafat 1380) dan Ratu Nahrasiyah (wafat 1428) keduanya dari Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian Laksamana Keumalahayati yaitu laksamana Kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Al Mukammil (1589-1604). Terdapat pula empat sultan wanita berturut-turut dari tahun 1641-1699 yaitu Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah, Sultanah Nurul Alam, Inayat Syah, dan Kamalat Syah. Sebagai pejuang dalam melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19 dikenal Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan lain-lain (Sartono Kartodiharjo, 1977; Ismail Sofyan, M. Hasan Basry, dan Ibrahim Alfian, 1994; Hayati, 2010).

Bergerak ke Jawa kita diyakinkan oleh pemerintahan Ratu Pramodhawardhani yang menggantikan ayahnya Samaratungga sebagai Raja Mataram Kuno pada pertengahan abad ke-8. Nusantara juga memiliki Tribhuwanottunggadewi yang memerintah Majapahit selama duapuluh dua tahun (1328-1350) (Kuntowijoyo, 2008). Di Jawa Tengah dikenal dua tokoh perempuan yang menjadi pemimpin pemerintahan yaitu Ratu Sima dari Kerajaan Ho-Ling (Kalingga) pada abad ke-7. Kerajaan itu diperkirakan terletak di Jawa Tengah Utara, diduga Jepara (Garraghan S.J., Gilbert J. 1957). Satu lagi adalah Ratu Kalinyamat, juga sering disebut Ratu Jepara, yang memerintah di Jepara pada tahun 1549-1579. Mari kita lihat lebih dekat apa yang dilakukan oleh Ratu Kalinyamat ketika memimpin Jepara. Sejarah nusantara, melalui berbagai serat dan prasasti memberikan pengalaman

besar bagaimana Ratu Kalinyamat memimpin Jepara. Jepara sebagai kerajaan maritim memiliki letak yang strategis yang mampu menghubungkan antara “kebudayaan darat” dan “kebudayaan laut”. Kebudayaan darat adalah daerah-daerah yang terletak di belakang kota pelabuhan yang meliputi daerah penyangga (*hinterland*) seperti Juana, Kudus, Pati, Welahan, sampai lebih ke dalam lagi seperti Purwodadi/Grobogan dan sebagainya. Sementara “kebudayaan laut” merupakan jalur perdagangan dan pelayaran dengan daerah-daerah di sekitarnya atau daerah seberang laut (Hayati, 2010). *Babad Tanah Jawa* dan *Babad Demak*, misalnya mengisahkan bahwa Ratu Kalinyamat mempunyai peran sentral dalam penyelesaian konflik di lingkungan keluarga Kesultanan Demak. Peran yang dilakukan ini menunjukkan kemampuannya yang melebihi tokoh lain dalam menghadapi desintegrasi Kerajaan Demak. Sepeninggal Sultan Prawata, ia menjadi pemimpin keluarga dan pengambil keputusan penting atas bekas wilayah Kasultanan Demak. Agaknya ia dihormati sebagai kepala keluarga Kasultanan Demak yang sesungguhnya.

Chusnul Hayati (2010) dalam sebuah laporan penelitian menyebutkan bahwa Ratu Kalinyamat dapat digambarkan sebagai tokoh wanita yang cerdas, berwibawa, bijaksana, dan pemberani. Kewibawaan dan kebijaksanaannya tercermin dalam peranannya sebagai pusat keluarga Kesultanan Demak. Meski pun ia sudah menjadi janda, tetapi Ratu Kalinyamat menjadi tumpuan bagi keluarga besar Kerajaan Demak. Tidak itu saja, oleh Ratu Kalinyamat, Jepara disulap menjadi kota dengan gairah dagang yang luar biasa. Sekitar tahun 1500-an, Jepara merupakan kota dagang penting di kawasan nusantara. Aktivitas perdagangan, baik darat maupun laut bergairah. Para pedagang dan pelaut dari kota itu telah melakukan aktivitas perdagangan sampai ke seberang laut, khususnya ke Maluku dan Malaka. Era kepemimpinan Ratu Kalinyamat, Jepara menjadi pusat perdagangan. Strategi pengembangan Jepara diarahkan untuk menguatkan peran perdagangan dan angkatan laut. Kedua bidang ini dapat berkembang baik berkat adanya kerjasama dengan beberapa kerajaan maritim seperti Johor, Aceh, Banten, dan Maluku.

Dari segi ekonomi, pelabuhan Jepara berfungsi sebagai tempat menampung surplus produk pertanian dari daerah-daerah *hinterland* untuk dipasarkan ke daerah-daerah lain di seberang laut. Sebaliknya Jepara juga berfungsi untuk menampung produk-produk dari daerah

luar yang selanjutnya didistribusikan atau diperdagangkan ke daerah-daerah *hinterland* (Hayati, 2010). Selama 30 tahun kekuasaannya (1549-1579), Ratu Kalinyamat telah berhasil membawa Jepara ke puncak kejayaannya. Kekuasaannya atas wilayah cukup kokoh karena tidak ada ancaman dari pihak mana pun. Sumber Portugis yang ditulis oleh Meilink-Roelofs menyebutkan bahwa Jepara menjadi kota pelabuhan terbesar di pantai utara Jawa dan memiliki armada laut yang besar dan kuat pada abad ke-16 (Sartono Kartodirjo, 1987). Kesimpulan ini dikuatkan oleh Steurs (2008) yang menelaah *Kitab Pararaton* menyebutkan bahwa perempuan Jawa sudah memerintah pada masa kejayaan Hindu (Steurs, 2008). Di pertengahan akhir abad 16 seorang putri memerintah Jepara dan lainnya memerintah Gresik. Steur mengutip G.F. Jippers “sejarah di Jawa dipenuhi dengan perempuan terhormat yang memegang jabatan-jabatan tinggi. Yang melakukan tugasnya sebagai duta pemerintah atau berperan aktif dalam dunia politik” (Steurs, 2008). Kapasitas dan pengetahuan, Ratu Kalinyamat dalam dua hal, politik dan militer, mempunyai pengaruh kuat di bidang politik dan militer. Di bidang militer, peranannya dibuktikan dengan pengiriman sejumlah besar armada laut untuk menyerang Malaka. Bukti tersohornya Ratu Kalinyamat pada pertengahan abad ke-16 antara lain dapat ditunjukkan dengan adanya permintaan dari penguasa-penguasa daerah. Sumber Portugis menyebutkan bahwa pada masa kekuasaan Ratu Kalinyamat, Jepara juga menjalin hubungan dengan para pedagang di Ambon. Beberapa kali para pemimpin pelaut atau pedagang Ambon di Hitu minta bantuan Ratu Jepara untuk melawan orang-orang Portugis maupun suku Hative di Maluku. Alasan Hitu minta bantuan ke Ratu Kalinyamat, karena Portugis memaksakan sistem monopoli sehingga tidak disenangi.

### **Perempuan dalam Peta Politik Indonesia Modern**

Menilik rentetan sejarah kuasa perempuan di atas, mana lagi yang perlu didustakan dan disimpan dalam benak kita tentang kuasa perempuan? Mitos dan fakta sejarah telah memberikan pengalaman pada bangsa ini bahwa peran perempuan tidak bisa diabaikan begitu saja dalam merawat keagungan nusantara. Maka menjadi aneh dan sebuah kemunduran jika hari ini perempuan memiliki intensitas yang kecil dalam keterlibatan kepemimpinan politik negara. Minimnya

partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam peta kepemimpinan eksekutif hari ini menimbulkan dua pertanyaan mendasar.

*Pertama*, apakah perempuan Indonesia sekarang ini tidak ada yang mampu dan mau untuk memiliki kesanggupan terlibat dalam aktivitas politik kekuasaan? Untuk pertanyaan ini, tentu dengan mudah dijawab. Kapasitas, kapabilitas, dan perempuan Indonesia tidak bisa diragukan. Sejarah panjang itu sudah dibuktikan dan memberikan pelajaran berharga bagi kesadaran perempuan Indonesia bahwa ia bisa. Pertanyaannya selanjutnya, kemauan. Perihal ini tentu perempuan sendiri yang harus menjawabnya. Perhelatan suksesi kepemimpinan Indonesia, untuk presiden RI 2005-2009, tidak ada sosok perempuan yang berkehendak maju untuk bersaing memperebutkan kursi presiden. Terlepas dari kemauan atau sistem rekrutmen yang masih berlangsung di Indonesia, proses suksesi ini tidak ada sosok perempuan dalam pertarungan pemilu. Bahkan dalam legislatif, hingga hari ini kuota 30 persen untuk perempuan tidak pernah tercapai. Jumlahnya cenderung menurun (Subono, 2014). Kenapa terjadi? Jangan-jangan benar apa yang ditulis oleh Abendanon 100 tahun lalu:

Ada beberapa sekolah di Jawa dan kepulauan lainnya yang ternyata didirikan oleh kaum perempuan Indonesia, yang telah menunggu lama, kemudian bertindak dan kita tidak mempunyai cukup penghargaan terhadap mereka saat menyadari bahwa perempuan Indonesia sangat pemalu (Abendanon, dalam Steurs, 2008).

Benarkah perempuan Indonesia pemalu? Inikah yang menjadi sebab terbesar tidak tampilnya perempuan dalam peta pertarungan politik nasional? Jika benar, maka sesungguhnya pernyataan Abendanon di atas kontekstual dalam bidang politik hingga hari ini. *Kedua*, apakah sistem demokrasi yang berlangsung saat ini tidak memungkinkan munculnya perempuan dalam pertarungan politik nasional? Pertanyaan ini mengandung banyak kerumitan dalam hal jawaban. Di satu sisi alam sadar Indonesia masih meminggirkan perempuan dengan stereotipe bahwa presiden perempuan belum menjadi kebutuhan Indonesia. Bahkan kemunculan Presiden Megawati menjadi presiden kelima Indonesia adalah hasil dari manuver para politisi DPR. Dalam dua pertarungan pemilihan langsung, Megawati kalah oleh sosok laki-

laki. Hal ini menunjukkan bahwa alam sadar politik warga negara belum memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin puncak negara. Di sisi yang lain, sistem kepartaian yang dijalankan oleh partai-partai di Indonesia tidak memberikan ruang yang leluasa bagi perempuan untuk bisa tampil dan memimpin. Hal ini bisa kita lihat dari sedikitnya pemimpin partai politik perempuan.

Peminggiran perempuan, terutama dalam tradisi Jawa, melalui “bukan tugas perempuan untuk jadi pemimpin” sesungguhnya telah terbantahkan dalam beberapa ulasan di atas. Kesadaran yang meminggirkan perempuan tersebut merupakan mitos. Pembentukan mitos perempuan dengan cara menempatkan perempuan dalam urusan domestik dibentuk oleh pemegang kuasa masa lalu, yang terus direproduksi hingga sekarang. Dari sana para penguasa masa lalu meniupkan kesadaran palsu kepada rakyatnya melalui mitos. Sebagaimana penguasa masa lalu, sesungguhnya setiap kita mampu menyusun dan membuat mitos sendiri. Misalnya, kita bisa membuat mitos tentang “tidak mungkin para pemimpin laki-laki negara ini mampu menyejahterakan rakyatnya. Maka dibutuhkan seorang perempuan untuk menjadi presiden, dan ia akan menyejahterakan rakyat”. Perebutan wacana untuk membentuk kesadaran seperti ini bisa jadi menumbuhkan wacana tanding.

Tetapi tentu saja bukan kesadaran tentang mitos yang diharapkan, melainkan kesadaran kritis warga tentang peran dan posisi perempuan dalam kepemimpinan politik. Dan jalan itu hanyalah melalui pendidikan. Kesadaran ini sesungguhnya juga sudah terbentuk lama. Novel *Lajar Berkembang* yang terbit tahun 1936, karya Takdir Alisjahbana dengan tenang menguraikan kesadaran perempuan Jawa. Melalui tokoh Tuti, kesadaran dan daya kritis itu kental. Tuti, tokoh sentral dalam novel itu menggugah peran ibu dalam pendidikan anak-anaknya.

Kita harus menunjukkan jalan untuk kelahiran perempuan baru, perempuan yang bebas mempunyai keberanian berdiri untuk semua yang ia lakukan dan pikirkan, tidak mungkin lagi mengurungnya di rumah. Seluruh dunia akan menjadi wilayahnya. Pernikahan tidak akan menjadi takdir satu-satunya. Ia akan bebas mempelajari karier ilmiah atau sosial.

Ketika novel itu pertama kali terbit, gerakan perempuan di Jawa

sedang dalam tahap yang tinggi (Steurs, 2008). Atau jauh sebelum itu, kita mengenal tokoh perempuan Minahasa Putri Bundo Kandung, yang dikenal dengan kebijaksanaannya dalam politik dan kepandaiannya dalam mendidik dan mengajarkan putranya, calon raja. Dia atas itu semua, tugas para pendidik, sejarawan, intelektual, dan departemen pendidikan khususnya adalah mewartakan semangat dan pengalaman pergerakan perempuan untuk kebebasan. Mengajarkan dan mewartakan sejarah kuasa perempuan menjadi penting. Pengajaran tersebut diperlukan oleh sebab penulisan sejarah kita hingga hari ini bias gender, menekankan sejarah laki-laki. Benar apa yang dinyatakan Mansour Fakih (1996) bahwa di antara soal-soal perjuangan yang harus diperhatikan, soal perempuan hampir selalu dilupakan.

## Penutup

Kesadaran kritis dibutuhkan untuk dengan jujur menerima perempuan sebagai sosok yang mampu dan kapabel dalam memimpin sebuah negara. Sejarah itu telah dicatat dengan kegemilangan. Nusantara mempunyai pengalaman panjang dipimpin oleh perempuan. Perempuan nusantara juga mempunyai pengalaman panjang menyiapkan pemimpin-pemimpin negeri. Sejarah bahkan juga telah membuktikan bahwa “pemingitan” terhadap perempuan dari ranah publik hanya santer di Jawa. Di Ambon, sebagaimana dipaparkan J.J. Naholi dan Graafland (Steurs, 2008), posisi perempuan berada pada ruang publik yang bebas seluas-luasnya.

Perempuan berada di posisi terdepan. Di dewan kota, seperti persidangan, perempuan dihargai kecerdasannya. Selama bertahun-tahun, dia menjadi anggota dewan gereja. Di beberapa desa di Ambon, seorang perempuan dipercaya memimpin desa dengan dibantu oleh dewan desa. Di Minahasa kaum perempuan tidak mengenal istilah pingit (*reclusion*). Para gadis dan perempuan dewasa dapat bergaul dengan kaum lelaki seperti saat mereka masih anak-anak. Di rumah seperti juga di sawah atau di pesta-pesta. Bersyukurlah untuk hal itu karena para gadis dibebaskan memperoleh pendidikan. Tidak dapat disangkal lagi, itulah alasannya mengapa perempuan Minahasa memiliki tubuh yang indah, kuat, dan sehat. (Stuers, 2008)

Pernyataan di atas memberi kita gambaran bahwa sejarah perempuan Indonesia telah merdeka sejak masa nusantara. Di Ambon, di Minahasa, di Sulawesi, dan sebagian Jawa pesisir, perempuan menempati posisi tinggi dalam konteks politik pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ruang dimana perempuan “berdiam diri” dari urusan publik. Sebab sejarah pemingitan terhadap perempuan lebih kental terjadi di Jawa. Namun, Jawa sebagaimana urusan lainnya, telah menghegemoni wacana keIndonesiaan, sehingga menutup peran perempuan-perempuan di luar Jawa untuk tampil dalam kancah nasional. Mereka (perempuan-perempuan Ambon, Minahasa, Aceh dan sebagian Jawa lainnya) telah memiliki sejarah panjang dalam tradisi kekuasaan. Dengan kaca mata sejarah yang memendarkan gemilangnya kuasa perempuan, maka tugas perempuan hari ini adalah bangun dari tidur panjang untuk bergerak dan menempati posisi-posisi politik negara. Gerakan tersebut musti diikuti dengan perubahan di berbagai lini, bukan hanya gerakan politik, yang mampu menopang dan memberi dasar gerakan. Dari sisi pemikiran, perlunya penguatan akademis dan intelektual untuk merumuskan filosofi dan budaya kepemimpinan perempuan dengan basis material pengalaman masa lalu. Namun untuk ini diperlukan kajian yang panjang dan sistematis. Ilmu pengetahuan formal dengan perempuan sebagai “basis materi ilmu” memungkinkan untuk diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Dengan cara demikian, kesadaran dan keterlibatan perempuan menemukan jalan terangnya.

## Daftar Pustaka

- Bonnefoy, Yves. (1993). *Asian Mythologies*. The University of Chicago Press, Chicago.
- Fakih, M. (1996). *Menggeser konsep gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Garraghan S.J. , Gilbert J. (1957). *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Hayati, C., (2010). Ratu Kalinyamat: Figur pemimpin kerajaan maritime di unduh dari [http://eprints.undip.ac.id/19560/1/chusnul\\_hayati\\_kalinyamat.pdf](http://eprints.undip.ac.id/19560/1/chusnul_hayati_kalinyamat.pdf) pada 10 September 2014.
- Ismail Sofyan, M. Hasan Basry, dan Ibrahim Alfian (ed) (1994). *Wanita Utama Nusantara Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Agung Offset.
- Kuntowijoyo, (2008). *Khotbah di Atas Bukit*. Yogyakarta: Benteng Pustaka.
- Saldi, H., & Bungkundapu, Y. (2013). *Sejarah perempuan Sulawesi Tengah*. Sulawesi Tengah: Pusat Penelitian Sejarah , Lemlit UNTAD.

Sartono Kartodirdjo (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).

Sartono Kartodirdjo (ed) (1977). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II*. Jakarta : PN Balai Pustaka

Steurs, C.V.D. (2008). *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Subono, Nur Iman (2004). Partisipasi Perempuan, Politik Elektoral dan Kuota: Kuantitas, Kualitas, Kesetaraan dalam *Jurnal Perempuan*, No. 79 tahun 2014.

Setiawan, B (1990). *Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 14*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.

# E-book Jurnal Perempuan

kunjungi kami di:

<http://www.wayang.co.id/index.php/majalah/jurnal-perempuan>

dan

<http://www.amazon.com/dp/B00EDR2GWW>

langsung dari PC/tablet/iPad anda

